

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan formal merupakan suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia sehari-hari di berbagai tempat dan wilayah di dunia. Pelaksanaan pendidikan formal (persekolahan) di Indonesia diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan sekolah. Pengelolaan sekolah memerlukan suatu ilmu dan keterampilan manajemen supaya sekolah dapat menghasilkan lulusan atau *output* pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Sekolah yang melaksanakan layanan pendidikan serta pengajaran secara efektif dan efisien, diharapkan akan mencapai tujuan pendidikan di sekolah dan secara agregasi mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang di amanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 bahwasannya tujuan pendidikan nasional adalah untuk “Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”.

Tidak hanya tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui manajemen sekolah, melainkan pelaksanaan pendidikan di sekolah pun harus dilaksanakan secara sesuai sehingga mengarah pada terwujudnya proses dan hasil pendidikan yang bermutu. Salah satu masalah dalam mengelola sekolah yang perlu diperhatikan adalah mutu. Onisimus Amtu (2011) memandang mutu sebagai berikut.

Mutu atau kualitas adalah layanan produk berupa barang/jasa yang bertalian dengan pemenuhan kebutuhan, harapan dan harganya mampu dijangkau pelanggan. Mutu tidak sekedar pada barang atau jasa, melainkan pada aspek estetika, penampilan, kenyamanan, praktis, tahan lama, keramahan (kesopanan) dalam pelayanan, ketepatan waktu, serta

disesuaikan dengan harapan dan keinginan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Mutu adalah naluri manusia untuk membedakan baik dan buruk.(hlm. 120)

Mutu pendidikan merupakan suatu kesesuaian apa yang diharapkan oleh *stakeholders* pendidikan itu sendiri, baik siswa, orang tua, masyarakat, maupun lembaga pemangku kepentingan dalam pendidikan. Hal ini sering terjadi masalah dimana mutu pendidikan di Indonesia masih rendah, sehingga harapan pelanggan kurang terpenuhi, mutu pendidikan salah satunya dapat dilihat dari bagaimana sekolah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai mutu pendidikan. Adapun dalam memenuhi mutu pendidikan, salah satunya dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut berisikan delapan standar nasional pendidikan yakni standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses pendidikan, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, standar penilaian pendidikan serta standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Nur Zazin (2011) menganalisis aplikasi manajemen mutu di sekolah sebagai berikut:

1. Implementasi manajemen kelembagaan
 - a. Visi dan misi lembaga belum jelas, bahkan ada yang tidak memiliki visi dan misi. Kalaupun ada, terkadang juga tidak/belum disosialisasikan dan dilaksanakan
 - b. Pemberdayaan SDM yang produktif belum maksimal, cenderung ada yang pilih kasih, dan tidak memberikan kewenangan secara proporsional.
 - c. Kurang kompak, bahkan saling menjatuhkan
 - d. Kurang adanya dukungan *stakeholder* dan dari pihak lain, bahkan tidak mau dipengaruhi atau mendapat bantuan pihak lain.
 - e. Kepemimpinan yang arogan dan tidak mau menerima saran bawahan.
 - f. Minimnya sarana dan prasarana
 - g. Kurangnya dukungan dana
 - h. Kurang seriusnya semua pihak dalam mewujudkan visi dan misi
2. Implementasi manajemen mutu kurikulum
 - a. Perubahan model kurikulum tidak diikuti keisapan guru
 - b. Kurangnya pembahasan dan analisis pelaksanaan kurikulum

- c. Kurangnya kreativitas guru dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum
- d. Kurang dimanfaatkannya KTSP sebagai agen perubahan kurikulum dan pembelajaran menuju perbaikan
- 3. Implementasi manajemen pembelajaran dan lulusan
 - a. Guru hanya berbasis buku teks
 - b. Buku tidak pernah dianalisis
 - c. Anak-anak dianggap tuntas sesuai buku dan ternyata tidak/kurang sesuai dengan kurikulum dan Ujian Nasional
 - d. Hanya berbasis LKS dan sekedar memberikan tugas, bahkan ditinggalkan begitu saja kepada siswa
 - e. LKS tidak pernah dianalisis, terlebih menjelaskan kesesuaian materi dan kehidupan sehari-hari.
 - f. Guru belum mampu membuat soal sendiri dan hanya sampai pada C-2, paling tinggi C2 (Kognitif).
 - g. Penilaian hasil belajar harus ada di semua pelajaran dan semua aspek
 - h. Misalnya, UN sebanyak 50% terdiri dari kemampuan BTH (Baca Tulis Hitung sebagai dasar awal). Meskipun saat ini mulai diubah, hal ini juga memerlukan pencermatan lagi dan nilai mata pelajaran lain juga harus disesuaikan standarnya. (hlm. 77-80)

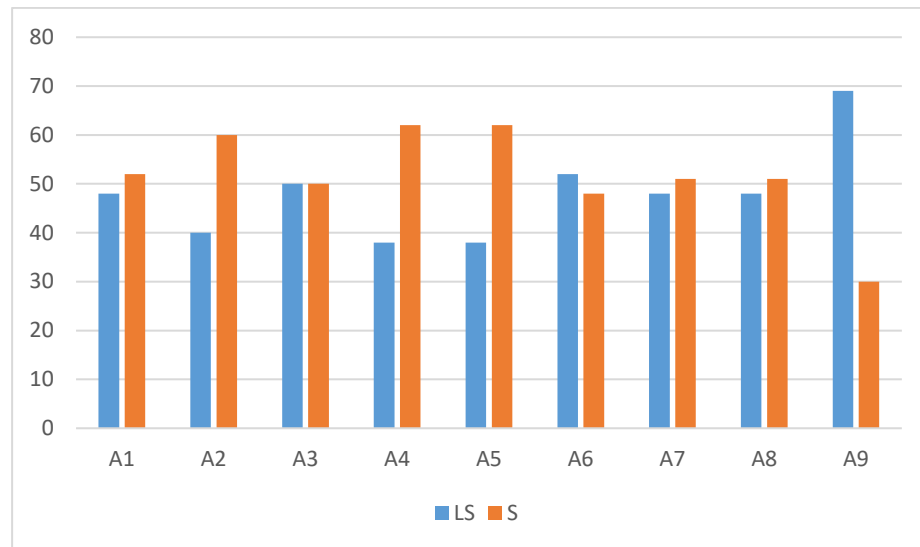
Praktik atau implementasi manajemen sekolah saat ini dihadapkan pada berbagai masalah. Sagala (2009, hlm. 9-10) memaparkan masalah atau problematika manajemen pendidikan diantaranya tampak pada ketersediaan perlengkapan pendidikan atau sekolah yang disediakan seingkali tidak sesuai dengan permintaan dan atau kebutuhan sekolah (*kualitas, kuantitas dan relevansi*), selain itu promosi jabatan guru belum jelas karena tidak ada perbedaan yang memadai dalam hal prestasi antara guru yang kreatif, inovatif dan rajin dengan guru yang sebaliknya. Hal ini jelas mendeskripsikan ternyata daerah-daerah tidak memiliki sistem manajemen guru, rekrutmen dan pembinaan kepala sekolah yang memadai.

Terkait dengan masalah yang muncul pada manajemen pendidikan, salah satu sebab pemangku kepentingan pendidikan tidak mampu memahami dan menerapkan ilmu manajemen pendidikan atau manajemen sekolah, adapun makna atau pengertian manajemen sekolah atau pengelolaan sekolah seperti yang dikemukakan oleh Diding Nurdin dan Imam Sibaweh (2015) yakni sebagai berikut.

Pengelolaan satuan pendidikan atau pengelolaan sekolah merupakan pengelolaan pendidikan yang berada pada unit paling bawah untuk merencanakan program pendidikan dan membuat keputusan yang berada pada tindakan-tindakan nyata yang dilakukan secara komprehensif untuk meng-cover seluruh kebutuhan-kebutuhan sekolah, visi, misi dan tujuan pendidikan sekolah. Dimana di dalamnya ada regulasi, aturan dan kesepakatan yang tidak boleh bersebrangan dengan regulasi, aturan, yang lebih tinggi daripada satuan pendidikan atau sekolah untuk mencapai kepentingan bersama dan juga mencakup kepada inventarisasi sekolah yang merupakan sarana dalam mencapai cita-cita sekolah.(hlm. 45)

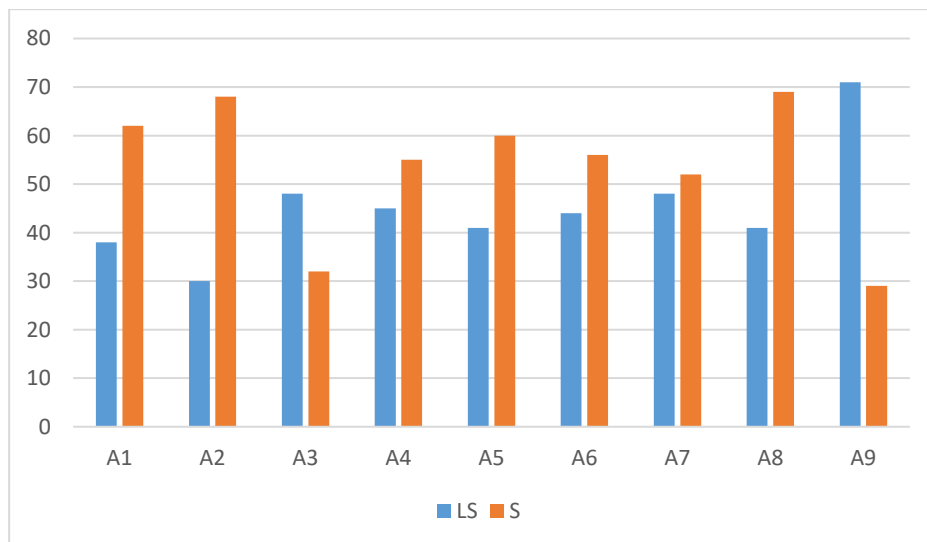
Mencermati pengertian di atas, jelaslah bahwa pengelolaan sekolah menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan melalui suatu proses serta perencanaan yang matang, pengorganisasian sumber daya sekolah supaya dapat mencapai tujuan sekolah. Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak masalah yang ditemui dalam pelaksanaan manajemen sekolah oleh para pengelola sekolah, khususnya kepala sekolah beserta jajarannya dan komite sekolah, dinas pendidikan (pemerintah daerah), dan pengawas sekolah. Permasalahan dalam pengelolaan sekolah seringkali menjadikan pihak sekolah belum mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu khususnya bagi peserta didik, sehingga muncul berbagai keluhan dari peserta didik, orang tua, guru, pemerintah dan masyarakat umum, bahwa pendidikan yang dilaksanakan di sekolah itu belum memenuhi standar mutu, atau yang dirasakan *stakeholders* tersebut tidak bermutu.

Masalah kapasitas sekolah yang utama adalah kapasitas manajemen sekolah. Berdasarkan hasil penelitian Horton et al (2003) dalam Triatna (2015, hlm. 10-11), banyak organisasi di negara-negara berkembang yang melakukan pengembangan kapasitas pada fisik dan keuangan organisasi dan sering melupakan pengembangan kapasitas yang paling penting, yaitu pengembangan kapasitas kepemimpinan dan manajemen. Beberapa masalah sudah diidentifikasi untuk menunjukkan bahwa kapasitas sekolah-sekolah di Indonesia saat ini mengalami banyak masalah, yaitu:



Gambar 1.1 Tingkat kepuasan orangtua terhadap sembilan atribut pelayanan pendidikan dasar pada jenjang SD (%)

(Sumber: Bappenas , 209, hlm. 4 dalam Triatna, 2015, hlm. 10)



Gambar 1.2 Tingkat kepuasan orangtua terhadap sembilan atribut pelayanan pendidikan dasar pada jenjang SMP (%)

(Sumber: Bappenas , 209, hlm. 4 dalam Triatna, 2015, hlm. 10)

Catatan: LS= Kurang Puas; S= Puas

A1=	Kualitas Proses Pembelajaran
A2=	Kualitas Pengajaran
A3=	Hasil dari Proses Pembelajaran yang berdampak pada kualitas SDM anak
A4=	Kondisi kenyamanan sekolah
A5=	Menjaga disiplin dan keamanan di sekolah
A6=	Keterlibatan orangtua
A7=	Kualitas Fasilitas Fisik
A8=	Kesiapan alih tahun pelajaran
A9=	Ketersediaan Biaya Sekolah Anak

(Sumber: Bappenas , 209, hlm. 4 dalam Triatna, 2015, hlm. 11)

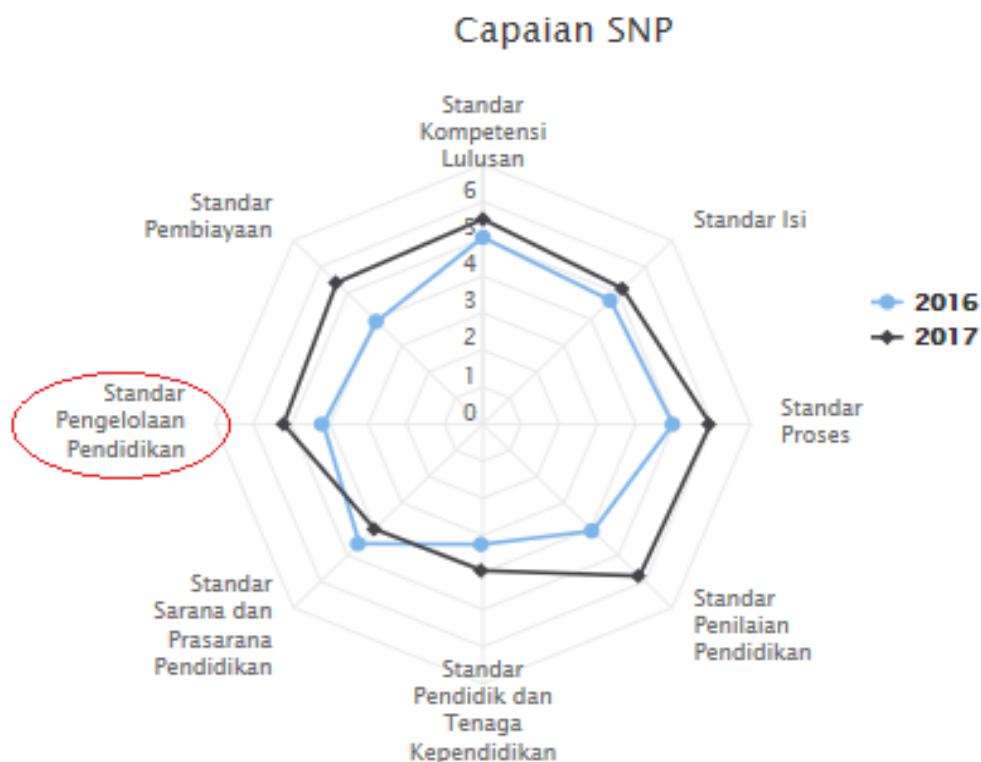
Temuan Bappenas mengenai tingkat kepuasan yang dirasakan oleh orang tua dilihat dari sembilan atribut pendidikan. Tinggi-rendahnya kepuasan pelanggan terhadap pendidikan merupakan penilaian pelanggan terhadap proses dan hasil karena terjadi interaksi antara pelanggan dengan layanan dan kondisi sekolah setiap harinya. Data tersebut menunjukkan adanya ketidakpuasan orang tua yang bervariasi sebagai pelanggan sekolah. Masalah tersebut muncul dan berkembang karena sebuah kondisi yang paling besar kemungkinan disebabkan karena kapasitas SDM sekolah tidak memiliki kapasitas untuk pelayanan dalam A1 (Kualitas Proses Pembelajaran), A3 (Hasil dari Proses Pembelajaran yang berdampak pada kualitas SDM anak), A6 (Hasil dari proses orangtua), A7 (Kualitas Fasilitas Fisik), A8 (Kesiapan alih tahun pelajaran), dan A9 (Ketersediaan Biaya Sekolah Anak). Temuan kajian Bappenas ini juga menunjukkan bahwa tinggi rendahnya kepuasan masyarakat terhadap sekolah dikaitkan dengan sejauh mana sekolah menjadi tempat belajar bagi anak. Keberadaan komponen sekolah seperti guru, kurikulum, fasilitas, dan berbagai komponen sekolah lainnya ditujukan untuk memberikan dukungan untuk terjadinya proses belajar bagi anak.

Hasil penelitian Wayan Koster (2011, dalam Triatna 2015, hlm. 12) yang meneliti tentang “Restrukturisasi Penyelenggaraan Pendidikan: Studi Kapasitas Sekolah Dalam Rangka Desentralisasi Pendidikan” menunjukkan hal yang sama, bahwasannya secara umum ada potensi yang cukup besar untuk menyelenggarakan otonomi sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan. Potensi tersebut terdapat pada empat aspek kapasitas sekolah yaitu: anggaran pendidikan, SDM sekolah, tersedianya sarana-prasarana, manajemen sekolah dan tingkat partisipasi orangtua siswa. Meskipun demikian, pada masing-masing aspek itu masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan.

Adapun studi Triatna (2015, hlm. 13-14) pada sekolah-sekolah (SD s.d. SMA/K) di berbagai Kota di Indonesia menunjukkan ada banyak persoalan terkait dengan kapasitas sekolah dalam menjalankan fungsi-fungsinya dan memecahkan masalah yang dihadapi sekolah saat ini, khususnya terkait dengan komponen PTK. Rincian masalah yang terkait dengan kapasitas manajemen sekolah khususnya pada fungsi pelaksanaan/implementasi program sekolah saat ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. PTK sekolah merasa berat untuk memenuhi berbagai kebijakan nasional seperti implementasi kurikulum 2013
2. Menurut pengakuan guru-guru, banyak dari mereka yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan untuk memberikan layanan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik.
3. Implementasi kebijakan pada tataran kota atau kabupaten dan sekolah masih dikategorikan bermasalah karena *mindset* sekolah dan pemerintah daerah masih birokrat bukan profesional. Sekolah diposisikan sebagai lembaga birokrat bagian dari birokrasi Pemda.

Selain itu, masalah capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) masih terdapat belum tercapainya Standar Nasional Pendidikan khususnya dalam Standar Pengelolaan Pendidikan sebagai berikut:



Gambar 1.3 Capaian 8 SNP pada tingkat nasional tahun 2016-2017

Sumber: Diolah dari data mutu pada website <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/raporng>

Dari gambar di atas menunjukkan bahwasannya Capaian Standar Pengelolaan (SNP) secara nasional pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan kondisi yang masih belum memenuhi standar. Skor 7 menunjukkan sekolah-sekolah telah memenuhi standar. Adapun untuk pencapaian Standar Pengelolaan secara nasional baru mencapai 4,17 (2016) dan 5,21 (2017). Hal ini menunjukkan permasalahan pendidikan yang memerlukan pemecahannya secara sistematis, mengingat pemenuhan 8 SNP sudah dilakukan sejak tahun 2006 sampai 2019 atau kurang lebih 13 tahun, sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada satuan pendidikan atau sekolah, pemenuhan standar pengelolaan ini masih menjadi kebingungan bagi banyak kepala sekolah dikarenakan kekurangpahaman kepala sekolah khususnya dalam melaksanakan proses manajemen sekolah yang baik.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Veranika Tahun 2018 mengenai “Pengaruh Kesehatan Pelaksanaan Program Kerja terhadap Mutu Sekolah di SMP Se-Kota Cimahi” menyebutkan kesehatan pelaksanaan program kerja sudah sering dilakukan pada sekolah SMP se-Kota Cimahi yang dilakukan dengan cara menyiapkan perangkat organisasi untuk implementasi program kerja. Namun capaian kondisi tersebut perlu ditingkatkan melalui faktor lain supaya tetap berkembang, sehingga diharapkan dapat efektif dalam meningkatkan mutu sekolah, serta menjadikan sekolah yang siap dan sehat untuk menghadapi perubahan masalah yang semakin kompleks. Hasil perhitungan korelasi sebesar 0,453, menunjukkan terdapat pengaruh yang cukup kuat antara variabel X (kesehatan pelaksanaan program kerja) dengan variabel Y (mutu sekolah). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan pelaksanaan program kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu sekolah.

Penelitian di atas memperkuat alasan bahwasannya pelaksanaan atau implementasi program sekolah haruslah dilaksanakan dengan sehat sebagai kegiatan realisasi dari perencanaan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan sekolah dan mencapai mutu pendidikan, hal tersebut dikarenakan implementasi program sekolah merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dilaksanakan, karena implementasi program sekolah merupakan bentuk aksi nyata dalam melaksanakan perencanaan yang telah disusun dan dibuat oleh sekolah. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh E. Mulyasa (2014, hlm. 21) bahwasannya pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Artinya, tujuan tidak akan dicapai apabila tidak ada tindakan nyata (implementasi).

Namun karena masih terdapat permasalahan dalam implementasi program sekolah maka harus dibuat suatu pemecahan masalah, salah satunya adalah dengan membuat instrumen kesehatan Diagnosis implementasi program sekolah untuk melihat dan mengukur apakah kegiatan implementasi sekolah tersebut sakit atau sehat, serta instrumen tersebut diharapkan dapat menjadi acuan sehingga pemangku kepentingan pendidikan (kepala sekolah,

dinas pendidikan, serta pengawas) mengetahui dan tidak kebingungan dalam melihat bagaimana manajemen sekolah khususnya implementasi program sekolah yang ideal.

Oleh sebab itu, karena adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pengelola pendidikan dalam manajemen sekolah, perlu dibuat instrumen untuk mendeteksi kesehatan manajemen sekolah, kemudian karena penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian tahun sebelumnya (penelitian ini tahun ke-2) bahwasannya hasil penelitian tahun ke-1 telah menghasilkan pengetahuan mengenai “Struktur Pengetahuan Patologi Manajemen Sekolah” sebagai bagian dari patologi organisasi pendidikan. Selain itu, terdapat urgensi penelitian ini perlu dilaksanakan diantaranya:

1. Renstra UPI 2016-2020, khususnya pada halaman 72 dan 73, yaitu:
“Terselenggaranya riset yang berorientasi pada produk unggulan dalam berbagai bidang ilmu, produk kebijakan, pengelolaan, dan penyelenggaraan pendidikan, serta penyelesaian isu-isu nasional dan internasional.”
2. Perlunya Departemen Administrasi Pendidikan, khususnya laboratorium Administrasi Pendidikan memiliki instrument diagnose kesehatan (penyakit) manajemen sekolah terstandar sebagai *knowledge capital* UPI yang akan menjadi *income generating* secara kelembagaan.
3. Pengelola dan penyelenggara sekolah sangat memerlukan instrumen terstandar dalam menDiagnosis penyakit manajemen sekolah dan melakukan pemecahan masalah secara terstandar.

Adapun penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triatna, Rosalin dan Hartini (2018) mengenai kesehatan manajemen sekolah. Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan pengetahuan baru mengenai kesehatan manajemen sekolah dengan tujuh bidang garapan, yaitu: Perencanaan Sekolah, Pengorganisasian Sumber Daya Sekolah, Penganggaran Sekolah, Implementasi Program Sekolah, Kepemimpinan Sekolah, Supervisi Sekolah dan Evaluasi Program Sekolah. Penelitian ini secara khusus mengambil bagian untuk membuat dan mengembangkan

instrumen Diagnosis kesehatan implementasi program sekolah di Sekolah Laboratorium Percontohan UPI dengan judul **“Diagnosis Kesehatan Implementasi Program Sekolah di Sekolah Laboratorium Percontohan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja dimensi dan indikator kesehatan implementasi program di Sekolah Laboratorium Percontohan Kampus UPI?
2. Instrumen seperti bagaimanakah yang digunakan untuk menDiagnosis kesehatan implementasi program di Sekolah Laboratorium Percontohan Kampus UPI?
3. Bagaimanakah kegunaan instrumen Diagnosis kesehatan implementasi program sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran atau harapan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian, adapun dalam tujuan penelitian ini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk membuat instrumen Diagnosis kesehatan implementasi program sekolah di Sekolah Laboratorium Kampus UPI.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dimensi dan indikator kesehatan implementasi program di Sekolah Laboratorium Percontohan Kampus UPI

- b. Untuk mengetahui instrumen seperti bagaimana yang digunakan untuk mendiagnosis kesehatan implementasi program di Sekolah Laboratorium Percontohan Kampus UPI
- c. Untuk menguji kegunaan instrumen Diagnosis kesehatan implelementasi program sekolah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan dalam mengukur kesehatan implementasi program sekolah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dilaksanakan (instrumen) digunakan sebagai alat dan bahan dalam menDiagnosis implementasi program sekolah, secara rincinya, dipaparkan sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk menambah wawasan, pengalaman, daya analitis serta penerapan ilmu administrasi pendidikan dalam memecahkan masalah manajemen sekolah, khususnya mengenai implementasi program sekolah.

b. Bagi Sekolah

Bagi sekolah, diharapkan instrumen implementasi program sekolah dapat digunakan dalam mengukur kesehatan implementasi program sekolah, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam melihat serta mengukur bagaimana implementasi program sekolah ini sudah baik atau belum (sehat atau sakit).

c. Bagi Program Studi Administrasi Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah dan memberikan kontribusi keilmuan serta mengisi kekosongan dalam membuat instrumen kesehatan implementasi program sekolah, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Secara sistematis umum skripsi ini terdiri dari judul penelitian, lembar pengesahan skripsi, lembar pernyataan keaslian skripsi, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, lima bab inti, daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung. Agar pembaca lebih mudah memahami pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “Diagnosis Kesehatan Implementasi Program Sekolah di Sekolah Laboratorium Percontohan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia”, penulis menguraikan sistematika struktur organisasi dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, BAB ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian yang menggambarkan alasan rasional dan pentingnya suatu permasalahan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, serta struktur organisasi skripsi.
- BAB II Kajian Pustaka, BAB ini berisikan konsep dan teori-teori yang melandasi penelitian yang dilakukan, yang diperoleh dari buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang mendukung.
- BAB III Metode Penelitian, BAB ini berisi penjabaran rinci mengenai metode penelitian serta komponen-komponennya, menyangkut cara melakukan pengujian data yang diperlukan untuk menghasilkan instrumen. Mulai dari desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Research and Development*.
- BAB IV Temuan dan Pembahasan, BAB ini terdiri dari dua bagian, yaitu pengolahan data dan analisis data untuk menghasilkan temuan

berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan pembahasan atau analisis temuan berupa instrumen Diagnosis kesehatan implementasi program sekolah.

- BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, BAB ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian.